

**KONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM (*RECHTVINDINGS*) OLEH
HAKIM TERHADAP PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)
DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Hukum Islam

OLEH :
ANDI HAKIM LUBIS
4001203002



**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 382 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan Doktor pada Program Studi Hukum Islam, mahasiswa atas nama **Andi Hakim Lubis**, NIM. **4001203002**, Judul Disertasi "**Konstruksi Penemuan Hukum (Rechtvindings) Oleh Hakim Pengadilan Agama Melalui Metode Ijtihad**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Proposal Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana Seminar Proposal Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;

11.Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI**

Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Proposal Disertasi Mahasiswa atas nama **Andi Hakim Lubis**, NIM. **4001203002**, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Seminar : Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
Penguji I : Dr. Fauziah Lubis, SH. M.Hum.
Penguji II : Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.
Penguji III : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
Penguji IV : Dr. Ansari, M.A.
Panitia : - Muhammad Habib, M.Hi.
- Gatot Teguh Arifyanto, S.H.

Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Seminar Proposal Disertasi
b. Melaksanakan Seminar Proposal Disertasi
c. Mengumumkan hasil Seminar Proposal Disertasi

Ketiga : Pelaksanaan Seminar Proposal ini akan dilaksanakan pada hari **Rabu, 27 Oktober 2021**

Keempat : Pembayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada **DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021**

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 14 Oktober 2021



Direktur,

Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Yang bersangkutan.

Nomor : B. 492 /PS WD/PS III/PP.00 9/03/2023 14 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : **Seminar Hasil Disertasi**
An. Andi Hakim Lubis, NIM. 4001203002

Kepada
Yth.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A. | (Ketua Seminar) |
| 2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.Hum. | (Sekretaris Seminar) |
| 3. Prof. Dr. Pagar, M.Ag. | (Penguji I) |
| 4. Dr. Fauziah Lubis, M.Hum | (Penguji II) |
| 5. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A. | (Penguji III) |
| 6. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum | (Penguji IV) |
- di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama **Andi Hakim Lubis**, NIM. 4001203002, Program Studi **Hukum Islam**, dengan Disertasi judul "**Konstruksi Penemuan Hukum (Rechstvindings) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023
Pukul : 09,00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.
Nip. 196208141992031003

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL DISERTASI

Berjudul :

**KONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM (*RECHTVINDINGS*) OLEH
HAKIM TERHADAP PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)
DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Dapat disetujui dan disahkan untu diajukan pada Ujian Seminar Hasil
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) pada Progrm Studi Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH :

Andi Hakim Lubis

4001203002

**DISETUJUI OLEH
KOMISI PEMBIMBING**

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M.Ag

**NIP : 195812311988031016
NIDN : 2031125801**

Pembimbing II



Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum

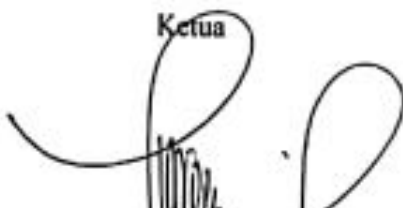
**NIP : 197105282008012013
NIDN : 0228057104**

PENGESAHAN

Proposal Disertasi berjudul "*Konstruksi Penemuan Hukum (Rechstvindings) Oleh Hakim Pengadilan Agama Melalui Metode Ijtihad (Studi Permohonan Dwangsom)*". An. Andi Hakim Lubis, NIM. 4001203002, Program Studi Hukum Islam, telah diseminarkan pada tanggal 27 Oktober 2021 dan telah diterima sebagai judul Disertasi.

Medan, 27 Oktober 2021
Panitia Ujian Seminar Proposal Disertasi
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



Dr. Phil. Zainul Fandi, MA
NIP. 196208141992031003

Sekretaris



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP. 197910202009011010

Penguji I



Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum
NIP. 197105282008012013

Penguji III



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 195812311988031016

Penguji

Penguji II



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 196208141992031003

Penguji IV



Dr. Ansari, MA
NIP. 196606241994031001

Mengetahui :

Ketua Brodi Hukum Islam Strata 3 (S3)
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA
NIP. 197910202009011010

ABSTRAK



Judul : Konstruksi Penemuan Hukum (*Rechtvindings*) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah

Nama : Andi Hakim Lubis

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag
2. Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum

Satu diantara persoalan penting dalam putusan hakim dan kaitannya dengan penemuan hukum akibat adanya kekosongan hukum khususnya di Pengadilan Agama adalah mengenai penerapan hukuman uang paksa (*dwangsom*). Ketentuan mengenai *dwangsom* itu sendiri diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. yakni dalam Pasal 606a dan 606b. Namun berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (1) dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan RBg. dan dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19/1964 dan SEMA Nomor 3/1965 yang menegaskan tentang berlakukannya HIR dan RBg. Adapun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 RBg. dengan tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg tersebut termasuk Rv.. Namun faktanya permohonan *dwangsom* masih sering kita jumpai dalam perkara di Pengadilan Agama.

Penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian normatif. penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti pustaka dan data sekunder mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan karena adanya kekosongan hukum terhadap penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama yang tidak diatur didalam HIR dan RBg., maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim terhadap permohonan *dwangsom* dengan terlebih dulu mencari hukumnya dalam undang-undang, yurisprudensi, maupun doktrin. Hasil pencarian hukum terhadap *dwangsom* kemudian ditemukan di dalam Rv. yang juga dulunya sumber hukum acara meski sudah tidak berlaku secara yuridis. Pertimbangan hakim dalam penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama dilakukan dalam upaya menghilangkan kesulitan terhadap pelaksanaan putusan hakim sehingga dipatuhi oleh tergugat/termohon. Sejalan dengan konsep *masalah mursalah*, maka penerapan *dwangsom* yang diatur dalam Rv. meskipun sudah tidak berlaku namun faktanya masih eksis, relevan dan dibutuhkan karena membawa manfaat dalam praktik peradilan untuk mempermudah pelaksanaan putusan hakim di Pengadilan Agama. Hal tersebut diperkuat oleh yurisprudensi, doktrin serta hasil Rakernas MA Tahun 2012. Perlu segera dibentuk aturan khusus dan teknis tentang *dwangsom* untuk dijadikan sebagai dasar hukum acara khususnya di Pengadilan Agama.

Kata Kunci : *Konstruksi, Penemuan Hukum, Dwangsom, Hakim, Masalah Mursalah*

ABSTRACT



Judul : Konstruksi Penemuan Hukum (*Rechtvindings*) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah

Nama : Andi Hakim Lubis

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag
2. Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum

One of the important issues in the judge's decision and its relation to legal discovery due to a legal vacuum, especially in the Religious Courts, is regarding the application of forced money (dwangsom). The provisions regarding the dwangsom itself are regulated in the Regulation op de Rechtsvordering or better known as the abbreviation Rv. namely in Articles 606a and 606b. However, the enactment of Emergency Law Number 1 of 1951 Article 5 paragraph (1) expressly states that the HIR and RBg are in force, and confirmed through the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 19/1964 and SEMA Number 3/1965 which confirms the application of HIR and RBg. As for Article 393 paragraph (1) HIP jo. Article 721 RBg. strictly prohibits all forms of procedural law other than those stipulated in the HIR and RBg, including Rv. However, the fact is that requests for dwangsom are still frequently encountered in cases in the Religious Courts.

The research in this dissertation is normative research. Normative legal research is carried out by examining literature and secondary data including research on legal principles, legal systematics, legal synchronization, legal history and comparative law. The research approach is through a statutory approach and a historical approach. Data collection techniques using interviews and literature study.

The results of this dissertation research show that because there is a legal vacuum regarding the application of dwangsom in the Religious Courts which is not regulated in the HIR and RBg., the judge must make a legal discovery. The finding of law by a judge against a dwangsom application by first looking for the law in law, jurisprudence, and doctrine. The results of a legal search against dwangsom were later found in Rv. which was also a source of procedural law even though it is no longer legally valid. The judge's consideration in applying dwangsom in the Religious Courts is carried out in an effort to eliminate difficulties with the implementation of the judge's decision so that the defendant/respondent obeys it. In line with the concept of masalah mursalah the application of dwangsom regulated in Rv. even though it is no longer valid, the fact is that it still exists, is relevant and needed because it brings benefits in judicial practice to facilitate the implementation of judges' decisions in the Religious Courts. This was reinforced by jurisprudence, doctrine and the results of the 2012 Supreme Court National Working Meeting. It is necessary to establish specific and technical rules regarding dwangsom to serve as the basis for procedural law, especially in the Religious Courts.

Keywords : Legal Construction, Legal Discovery, Dwangsom, Judge, Masalah Mursalah

3 - 5

خلاصة



Judul : Konstruksi Penemuan Hukum (*Rechtvindings*) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah

Nama : Andi Hakim Lubis

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag
2. Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum

من القضايا المهمة في قرار القاضي وعلاقته بالكشف القانوني بسبب الفراغ القانوني ، وخاصة في المحاكم يتم تنظيم الأحكام المتعلقة بـ *dwangsom* الدينية ، فيما يتعلق بتطبيق العقوبات المالية القسرية وهي *Rv* أو المعروفة بالاختصار *Regulation op de Rechtsvordering* نفسها في *dwangsom* في المادتين 606 أ و 606 ب. ومع ذلك ، فإن سن قانون الطوارئ رقم 1 لعام 1951 والمادة 5 الفقرة (1) ساريان. وتم التأكيد عليه من خلال الرسالة الدورية *RBg* ينص صراحة على أن مجلس حقوق الإنسان و *RBg* و *HIR* الذي يؤكد تطبيق *SEMA 3/1965* رقم 19/1964 ورقم *SEMA* للمحكمة العليا يحظر بشكل صارم جميع أشكال القانون *RBg*. المادة 721 *HIR jo.* بالنسبة للمادة 393 فقرة (1) ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي *Rv* ، بما في ذلك *RBg* و *HIR* الإجرائي بخلاف تلك المنصوص عليها في لا تزال تواجه بشكل متكرر في القضايا في المحاكم الدينية. *dwangsom* وأن طلبات

البحث في هذه الرسالة هو بحث معياري. يتم إجراء البحث القانوني المعياري من خلال فحص المؤلفات والبيانات الثانوية بما في ذلك البحث في المبادئ القانونية ، والنظاميات القانونية ، والتزام القانوني ، والتاريخ القانوني ، والقانون المقارن. نهج البحث هو من خلال نهج قانوني ومنهج تاريخي. تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات ودراسة الأدبيات.

في المحاكم *dwangsom* تظهر نتائج بحث الأطروحة أنه نظراً لوجود فراغ قانوني فيما يتعلق بتطبيق ، يجب على القاضي إجراء اكتشاف قانوني. العثور على *RBg* و *HIR* الدينية غير الخاضعة للتنظيم في من خلال البحث أولاً عن القانون في القانون والفقهاء *dwangsom* القانون من قبل القاضي ضد تطبيق الذي كان أيضاً مصدرًا *Rv* لاحقاً في *dwangsom* والعقيدة. تم العثور على نتائج البحث القانوني ضد للقانون الإجرائي على الرغم من أنه لم يعد صالحاً من الناحية القانونية. يتم تنفيذ نظر القاضي في تطبيق في المحاكم الدينية في محاولة لإزالة الصعوبات في تنفيذ قرار القاضي بحيث يطبعه المدعى *dwangsom* على *Rv* المنظم في *dwangsom* عليه / المدعى عليه. تماشياً مع مفهوم المصلحة المرسل ، فإن تطبيق الرغم من أنه لم يعد صالحاً ، فإن الحقيقة هي أنه لا يزال موجوداً ، وهو مهم ومطلوب لأنه يجلب فوائد في الممارسة القضائية لتسهيل تنفيذ قرارات القضاة في المحاكم الدينية. وقد تم تعزيز ذلك من خلال الفقه والمذهب ونتائج اجتماع العمل الوطني للمحكمة العليا لعام 2012. ومن الضروري وضع قواعد محددة لتكون بمثابة أساس لقانون الإجراءات ، لا سيما في المحاكم الدينية. *dwangsom* وفنية فيما يتعلق بـ

كلمات مفتاحية: البناء القانوني ، الإختراع ، الإيجار ، القاضي ، مصلحة مرسل

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PERSETUJUAN
SURAT PERNYATAAN
PEDOMAN TRANSLITERASI
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Batasan Istilah	15
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Landasan Teori.....	21

BAB II. KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis Penemuan Hukum (<i>Rechtvindings</i>) Oleh Hakim	40
1. Pengertian Penemuan Hukum	40
2. Sumber-Sumber Penemuan Hukum	48
3. Aliran-Aliran Penemuan Hukum	51
4. Perkembangan Penemuan Hukum di Indonesia.....	58
5. Prosedur Penemuan Hukum Oleh Hakim	62
6. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim	68
a. Metode Penemuan Hukum Positif.....	71
b. Metode Penemuan Hukum Islam	85

B. Kajian Teoritis Terhadap <i>Dwangsom</i> di Pengadilan Agama	97
1. Pengertian Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	105
a. Sifat dan Prinsip Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	108
b. Jenis dan Fungsi Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	111
c. Tujuan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	114
d. Ihkwal Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	116
2. Sejarah dan Penerapan di Indonesia.....	128
3. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>).....	130
4. Eksistensi Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)di Pengadilan Agama	136
5. Relevansi permohonan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) di Pengadilan Agama	142
C. Kajian Teoritis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim.....	145
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	145
2. Dasar Pertimbangan Hakim	153
3. Urgensi Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim.....	161
4. Aspek-Aspek Pertimbangan Hukum Hakim	164
D. Masalah Mursalah Sebagai Perspektif Kajian	166

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	173
B. Objek Kajian	174
C. Pendekatan Kajian.....	174

D. Sumber Data Penelitian.....	176
E. Teknik Pengumpulan Data.....	177
F. Analisis Data.....	178

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Penemuan Hukum (<i>Rechtvindings</i>) Oleh Hakim Terhadap Permohonan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) di Pengadilan Agama	179
B. Metode Penemuan Hukum (<i>Rechtvindings</i>) Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) di Pengadilan Agama.....	188
C. Masalah Mursalah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan terhadap Permohonan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	193

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	205
B. Saran.....	207

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA